

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN  
RASIO KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BINJAI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat*

*Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)*

*Program Akuntansi*



Oleh :

**Nama : Cut Febri Fitriani**

**NPM : 1305170264**

**Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**CUT FEBRI FITRIANIS. NPM. 1305170264. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Pemerintah Kota Binjai, 2017, Skripsi.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Binjai bila diukur dengan rasio keuangan daerah dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rasio keuangan daerah masih dibawah standar rasio daerah.

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Binjai berupa data-data jumlah APBD Kota Binjai untuk tahun 2013 sampai tahun 2016.

Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Binjai yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami penurunan, dimana penurunan rasio kemandirian terjadi dikarenakan rendahnya jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Binjai, sedangkan penurunan yang terjadi untuk tingkat rasio efektivitas pemerintah daerah Kota Binjai, hal ini terjadi dikarenakan pendapatan yang diperoleh tidak mencapai anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Binjai dan peningkatan yang terjadi untuk rasio efisiensi terjadi dikarenakan besarnya jumlah belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai dibandingkan dengan pendapatan daerah

**Kata Kunci :** *Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisien*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya, tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE,MM,M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Ade Gunawan, SE,M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Ibu Dahrani, SE, M.Si, Selaku dosen pembimbing saya dalam penyelesaian skripsi.
9. Staf Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan berkas dan administrasi.
10. Bapak Pimpinan Pemerintah Kota Binjai beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
11. Kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

Seiring doa dan semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya mengharapkan ridho Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan Tugas Akhir ini yang jauh dari kesempurnaan.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, Aamiin... ya Rabbal Alaamiin...

Medan, April 2017  
Penulis

**CUT FEBRI FITRIANIS**  
**1305170264**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan dan Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Uraian Teoritis.....	10
1. Kinerja Keuangan Daerah.....	10
a. Pengertian Kinerja.....	10
b. Pengertian Kuangan Daerah .....	11
c. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah.....	13
d. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah.....	14
e. Indikator Kinerja Keuangan Daerah .....	14
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	15
a. Pengertian APBD .....	15
b. Fungsi-Fungsi APBD.....	18
c. Prinsip-Prinsip Anggaran Daerah .....	19
d. Mekanisme Penyusunan APBD .....	20
3. Analisis Kinerja Keuangan Daerah .....	22
4. Rasio Keuangan Daerah.....	23
5. Penelitian Terdahulu .....	31
B. Kerangka Berpikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Definisi Operasional Variabel .....	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Teknik Analisa Data .....	38

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Deskripsi Data.....	39
2. Analisis Data.....	39
B. Pembahasan .....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Binjai.....	4
Tabel 1.2	Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Binjai .....	5
Tabel 1.3	Rasio Efisien Pemerintah Kota Binjai .....	6
Tabel 2.1	Klasifikasi Pengukuran Kemandirian .....	..25
Tabel 2.2	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas.....	..26
Tabel 2.2	Klasifikasi Pengukuran Efisien.....	..27
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 3.1	Waktu Penelitian .....	37
Tabel 4.1	Rasio Kemandirian .....	41
Tabel 4.2	Rasio Efektivitas .....	43
Tabel 4.3	Rasio Efisien .....	45
Tabel 4.4	Pengukuran Keuangan .....	49

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	34
Gambar 4.1 Rasio Kemandirian .....	41
Gambar 4.2 Rasio Efektivitas .....	43
Gambar 4.3 Rasio Efisien .....	46

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan No. 33 Tahun 2004, kedua UU ini mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang tidak hanya berlaku pada lembaga atau orang yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau orang non komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan atas peraturan daerah. (Nordiawan, dkk, 2007 hal. 39)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemko. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemko. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran. Oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang-kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2009 hal. 299).

Analisis rasio keuangan sebagai salah satu alat analisis telah banyak digunakan untuk menilai kinerja lembaga atau organisasi yang bersifat profit oriented, namun masih jarang dilakukan pada lembaga atau organisasi nonprofit oriented khususnya pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena penyajian laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai keterbatasan serta sifat dan cakupan yang berbeda. Menurut Widodo (2009 hal. 259), penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) selama ini berdasarkan asas keseimbangan

incremental budget dimana masing-masing kelompok pendapatan dan besarnya belanja dihitung dengan meningkatkan sejumlah presentase tertentu (berdasarkan tingkat inflasi).

Menurut Halim (2008 hal. 24) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Menurut Halim (2008 hal. 230) mengemukakan penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan dan rasio DSCR.

Pemerintah Kota Binjai merupakan salah satu instansi daerah yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Binjai memiliki pola yang jelas dan jumlah anggaran yang semakin besar, dimana pendapatan pemerintah Kota Binjai berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah lainnya yang sah, sedangkan untuk belanja daerah yang dikeluarkan berasal dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung pemerintah Kota Binjai. Pengukuran kinerja pemerintah Kota Binjai yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Rasio Kemandirian Pemerintah**  
**Kota Binjai**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Total Pendapatan</b>	<b>RKKD</b>	<b>Standar Rasio Kemandirian</b>
2013	Rp. 49.172.643.726	Rp. 711.568.038.362	6,9%	75% - 100%
2014	Rp. 71.967.137.635	Rp. 804.091.375.966	9%	75% - 100%
2015	Rp. 78.327.792.810	Rp. 843.711.784.005	9,3%	75% - 100%
2016	Rp. 54.287.975.045	Rp. 867.041.924.063	6,3%	75% - 100%

*Sumber : Data diolah (2017)*

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1.1. di atas kemampuan keuangan Pemerintah Kota Binjai ditahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan, sedangkan untuk tahun 2016 rasio kemandirian mengalami penurunan namun masih berada dibawah standar kepmendagri No.690.900.327. Untuk tahun 2013 rasio kemandirian sebesar 6,9% yang termasuk dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0 sampai 25%. Untuk tahun 2014 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 9% tetapi masih termasuk dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0 sampai 25%. Untuk tahun 2015 rasio kemandirian mengalami peningkatan 9,3%, tetapi juga masih termasuk dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0 sampai 25%. Untuk tahun 2016 rasio kemandirian mengalami penurunan menjadi 6,3% yang dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0 sampai 25%

Rasio kemandirian masih tergolong rendah sekali, karena masih berada diantara 0 sampai 25%, selain itu rasio kemandirian pada Pemerintah Kota Binjai juga termasuk pola hubungan yang instruktif dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah.

Menurut Halim (2008 hal. 234) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah atau ekonomi fiskal menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam

membayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 1.2**  
**Rasio Efektivitas Pemerintah**  
**Kota Binjai**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>Target Pendapatan</b>	<b>Efektivitas</b>	<b>Standar Rasio Efektivitas</b>
2013	Rp. 711.568.038.362	Rp. 777.139.382.117	91,6%	(x > 100%)
2014	Rp. 804.091.375.966	Rp. 825.842.666.546	97,4%	(x > 100%)
2015	Rp. 843.711.784.005	Rp. 906.257.726.285	93,1%	(x > 100%)
2016	Rp. 867.041.924.063	Rp. 1.048.464.949.879	82,7%	(x > 100%)

*Sumber : Data diolah (2017)*

Dapat dilihat dari tabel 1.2 untuk target penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami penurunan, hanya ditahun 2014 rasio efektivitas mengalami peningkatan, namun rasio efektivitas untuk setiap tahunnya masih berada dibawah standar kepmendagri No.690.900.327, untuk tahun 2013 rasio efektivitas sebesar 91,6% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%, untuk tahun 2014 rasio efektivitas mengalami peningkatan menjadi 97,4% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%, sedangkan untuk tahun 2015 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 93,1% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%. Untuk tahun 2016 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 82,7% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%.

Untuk rasio efektivitas tahun 2013 sampai tahun 2016 masih termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah dari 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif. (Mardiasmo, 2009 hal. 211).

**Tabel 1.3**  
**Rasio Efisien Pemerintah**  
**Kota Binjai**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Belanja Daerah</b>	<b>Realisasi Pendapatan Daerah</b>	<b>Efisien</b>	<b>Standar Rasio Efisien</b>
2013	Rp. 702.167.562.649	Rp. 711.568.038.362	98,7%	( x < 100%)
2014	Rp. 804.308.312.949	Rp. 804.091.375.966	100,02%	( x < 100%)
2015	Rp. 885.211.617.571	Rp. 843.711.784.005	105%	( x < 100%)
2016	Rp. 904.679.642.948	Rp. 867.041.924.063	104,3%	( x < 100%)

*Sumber : Data diolah (2017)*

Dapat dilihat dari tabel 1.3 untuk rasio efisiensi pada tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan, sedangkan ditahun 2016 rasio efisiensi mengalami penurunan, untuk tahun 2014 sampai tahun 2016 rasio efisiensi berada diatas standar kependagri No.690.900.327. Untuk tahun 2013 rasio efisiensi sebesar 98,7% yang termasuk dalam kategori efisien karena berada dibawah 100%, sedangkan untuk tahun 2014 rasio efisiensi mengalami peningkatan menjadi 100,02% yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%, untuk tahun 2015 rasio efisiensi mengalami peningkatan menjadi 105% yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%, untuk tahun 2016 rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 104,3% tetapi masih termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%.

Efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. (Mardiasmo, 2009 hal. 213)

Menilai Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya

dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Penilaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan. (Nirzawan, 2011 hal. 69).

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan dan rasio DSCR. (Halim, 2008 hal. 230).

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Addina Marizka (2010) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan dalam merealisasikan pendapatan pada tahun 2003-2007 dapat dikatakan efektif dan efisiensi, pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Pemerintah Kota Binjai”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Rasio Kemandirian Daerah Kota Binjai untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 berada dibawah Standar Kepmendagri No.690.900.327.
2. Rasio Efektivitas untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 berada dibawah Standar Kepmendagri No.690.900.327.
3. Rasio Efisiensi untuk tahun 2014 sampai tahun 2016 berada diatas Standar Kepmendagri No.690.900.327.

## **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud. Penelitian ini hanya membahas tentang tiga rasio dalam mengukur kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Sedangkan untuk tiga rasio lagi tidak digunakan dikarenakan indikator penilaian yang tidak mendukung atas penelitian.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Binjai bila diukur dengan rasio keuangan daerah?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan rasio keuangan daerah masih dibawah standar rasio daerah?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Binjai bila diukur dengan rasio keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rasio keuangan daerah masih dibawah standar rasio daerah.

### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis

Untuk mengembangkan wawasan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya menilai kinerja keuangan Pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Kota Binjai

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya peningkatan kinerja Pemerintah Kota Binjai.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Kinerja Keuangan Daerah**

###### **a. Pengertian Kinerja**

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus.

Dengan adanya kinerja maka dapat diukur tingkat keberhasilan. Menurut Bastian (2006 hal.329) menyatakan bahwa: “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi terutang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu”.

Kinerja dapat dicapai dengan menggunakan sistem yang baik. Menurut Mardiasmo (2009 hal. 113) mendefinisikan bahwa “Sistem pengukuran kinerja publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial”.

Adapun Indikator dalam mengukur kinerja menurut Mardiasmo (2009 hal. 119) bahwa sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan yang ditargetkan dalam APBD.
2. Efisiensi biaya
3. Efektivitas program
4. Pemerataan dan keadilan

#### **b. Pengertian Keuangan Daerah**

Didalam suatu organisasi perlu memperhatikan penggunaan keuangan secara optimal. Menurut Halim (2008 hal. 18-19) menyatakan bahwa

“Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasi atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan sistem yang baik.

Menurut Moito (2009 hal. 98) menyatakan bahwa

“Perspektif kedepan dari sistem keuangan daerah adalah mewujudkan sistem perimbangan antara keuangan pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta kewajiban untuk mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan”.

Pengukuran penggunaan keuangan tidak hanya dilakukan untuk perusahaan saja, untuk dipemerintahan juga perlu dilakukan. Menurut Halim

(2008 hal. 25) menyatakan “Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara. Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena dari keuangan daerah menggambarkan cerminan kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi.

Salah satu aspek pemerintah daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik, hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi penganggaran untuk kepentingan publik, tetapi pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai isi pasal 4 yaitu:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi pemerintah, pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan dimana menurut pasal 55 sumber pembiayaan pemerintah terdiri dari 3 komponen yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari beberapa pos pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan pendapatan yang sah lainnya .
2. Pendapatan yang berasal dari pusat yang terdiri dari pendapatan hasil pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
3. Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya.

Pendapatan yang berasal dari besarnya dana dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian ada beberapa proyek pemerintah pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk dalam anggaran pemerintah Daerah (APBD).

### **c. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja keuangan daerah. Menurut Oesi Agustina (2013 hal. 3) menyatakan bahwa :

“Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran”.

Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

#### **d. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Tujuan pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Mardiasmo (2009 hal. 121) adalah:

- 2) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
- 3) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 4) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

#### **e. Indikator Kinerja Keuangan Daerah**

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah. Menurut Mohamad Mahsun (2012 hal. 196) indikator Kinerja Keuangan Daerah meliputi:

- 1) Indikator Masukan (*Inputs*), misalnya :
  - a) Jumlah dana yang dibutuhkan
  - b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan
  - c) Jumlah infra struktur yang ada
  - d) Jumlah waktu yang digunakan

- 2) Indikator Proses (*Proces*), misalnya :
  - a) Ketaatan pada peraturan perundangan
  - b) Rata-rata yang diperlukan untuk menghasilkan layanan jasa
- 3) Indikator Keluaran (*Output*), misalnya :
  - a) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
  - b) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa
- 4) Indikator Hasil (*Outcome*), misalnya :
  - a) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
  - b) Produktivitas para karyawan atau pegawai
- 5) Indikator Manfaat (*Benefit*), misalnya :
  - a) Tingkat kepuasan masyarakat
  - b) Tingkat partisipasi masyarakat
- 6) Indikator *Impact*, misalnya :
  - a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
  - b) Peningkatan pendapatan masyarakat

## **2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

### **a. Pengertian APBD**

Didalam pemerintahan penggunaan keuangan diatur dalam APBD. Dalam UU No 33 pasal 1 ayat 17, menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain

menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 2 paragraf 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBD merupakan dokumen anggaran tahunan, maka seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dicatat dalam APBD. Menurut Moito (2009 hal. 119) menyatakan “APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada satu tahun anggaran”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan

untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Menurut Nirzawan (2011 hal, 79), penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma-norma dan prinsip anggaran sebagai berikut.

**b. Fungsi-Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Fungsi APBN/APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu:

1. Fungsi Otoritasi

Fungsi Otoritasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

2. Fungsi Perencanaan

Fungsi Perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### 4. Fungsi Alokasi

Fungsi Alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.

#### 5. Fungsi Distribusi

Fungsi Distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

#### 6. Fungsi Stabilitas

Fungsi Stabilitas memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

### **c. Prinsip-Prinsip Anggaran Daerah**

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara/Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:

1. Kesatuan, Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas, Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.

3. Tahunan, Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
4. Spesialitas, Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Akreal, Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.
6. Kas, Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari Kas Daerah.

**d. Mekanisme penyusunan APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah daerah bersama-sama Legislatif Daerah menyusun kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan – ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam kebijakan umum APBD, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005).

Dalam menyusun anggaran tahunan, mekanisme dan proses penjarangan informasi pada dasarnya merupakan bagian dan upaya pencapaian visi, misi,

tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Namun demikian, dalam proses ini kebijakan anggaran harus dijadikan payung bagi eksekutif khususnya unit kerja dalam menyusun kebijakan anggaran tahunan. Dalam penyusunan rencana kerja masing-masing program harus sudah memuat secara lebih rinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran program output yang akan dihasilkan, sumber daya yang dibutuhkan, periode pelaksanaan program, lokasi dan indikator kinerja. Seluruh program yang telah dirancang oleh masing-masing unit kerja, selanjutnya diserahkan ke Panitia Eksekutif. Panitia eksekutif selanjutnya menganalisis dan bila perlu menyeleksi program-program yang akan dijadikan rencana kerja di masing-masing unit kerja berdasarkan program kerja yang masuk ke Panitia Eksekutif selanjutnya disusun dan dirancang dalam Kebijakan Pembangunan Dan Kebijakan Anggaran Tahunan (APBD) yang nantinya akan dibahas dengan pihak Legislatif (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).

a. Siklus Anggaran

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang secara garis besar terdiri dari:

1. Penyusunan dan Penetapan APBD
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

### 3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD.

Penyusunan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

### **3. Analisis Kinerja Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mohamad Mahsun (2012 hal.135) menyatakan bahwa “Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan”. Penggunaan analisis rasio sektor publik terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel. Menurut Halim (2008 hal. 4) yang menyatakan “analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta”.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya

sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Halim (2008 hal.4) menyatakan bahwa “pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu: pihak DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor”.

#### **4. Rasio Keuangan Daerah**

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Menurut Halim (2008 hal. 230) menyatakan bahwa “Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan”.

Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

##### **a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar

pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Menurut Halim (2008 hal. 235) yang menyatakan bahwa “semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah”. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (keuangan ) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Pengukuran Kemandirian**

Persentase	Kemampuan Keuangan
0% - 25%	Rendah Sekali
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

*Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327*

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

**b. Rasio Efektivitas**

Rasio Efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Pengukuran Efektivitas**

Persentase	Kriteria
(x > 100%)	Efektif
(x = 100%)	Efektivitas Berimbang
( x < 100%)	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327

Rasio efektivitas digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam penggunaan keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2009 hal. 111) yang menyatakan bahwa “Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif”.

### c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Pengukuran Efisien**

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

*Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327*

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengfesiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2009 hal. 112) yang menyatakan bahwa bila “Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik”.

**d. Rasio Keserasian**

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal.

Menurut Halim (2008 hal.236) menyatakan bahwa “Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil”.

Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

- 1) Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah.

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi.

Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis

dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang..

Menurut Mahmudi (2010 hal.164) menyatakan bahwa “Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung akan memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah”. Rasio belanja operasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- 2) Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti dalam menentukan berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara yang berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh

karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

**e. Rasio Pertumbuhan**

Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu. Menurut Mahmudi (2010 hal.138) menyatakan bahwa “Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif”. Rasio pertumbuhan dilakukan untuk mengukur seberapa besar tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan dalam meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{Pn - P0}{P0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

Pn = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja

Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P0 = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja

Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Halim (2008 hal. 241) menyatakan bahwa untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai

Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

**f. DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*)**

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. DSCR dapat dihitung dengan rumus (Halim, 2008 hal. 238):

$$DSCR_i = \frac{(PAD+BD+DAU) - BW}{Total (Pokok Angsuran+Bunga+Biaya Pinjaman)}$$

## 5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Binjai pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mohammad Adhim (2008)	Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah dan kaitannya dengan Perekonomian Daerah di kabupaten Sarolangun	Penelitian menganalisis kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Data yang digunakan adalah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD periode anggaran dari tahun 2001-2007.	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sarolangun dalam merealisasikan pendapatan baik PAD dan Pajak daerah dari tahun 2001-2007 dapat dikatakan efektif dan efisien. Kabupaten Sarolangun masih tergantung pada pemerintah pusat sehingga penyelenggaraan desentralisasi masih rendah.
2	Addina Marizka (2010)	Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan	Penelitian ini menganalisis kinerja pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Medan yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengguna data dalam menganalisis adalah APBD dan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Medan tahun 2003-2007	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan dalam merealisasikan pendapatan pada tahun 2003-2007 dapat dikatakan efektif dan efisiensi, pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif.
3	Heri Triyono (2013)	Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja	Penelitian menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD 2009-	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian rendah dengan

		Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD 2009-2011	2011 yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah	tingkat ketergantungan dari pihak eksternal masih tinggi. Rasio efektivitas yang dicapai tinggi. Rasio efisiensi menunjukkan dalam memungut PAD sudah efisien. Rasio aktivitas pada belanja pembangunan masih rendah. Rasio pertumbuhan menunjukkan hasil yang positif. Rasio derajat desentralisasi rendah.
4	Zulia Hanum (2011)	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai	Penelitian ini menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengguna data dalam menganalisis adalah APBD dan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Serdang Bedagai tahun 2003-2007.	Dari hasil penelitian diketahui bahwa terjadi peningkatan pendapatan daerah dari tahun – ketahun (2007-2009). Terjadi SILPA yang meningkat dari tahun – ketahun, artinya belanja Kabupaten Serdang Bedagai hanya sedikit.
5	Joko Pramono(2014)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)	Penelitian ini menganalisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian. Tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta sudah sangat efisien dan efektif, sedangkan untuk Pertumbuhan PAD cukup tinggi.

## **B. Kerangka Berpikir**

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

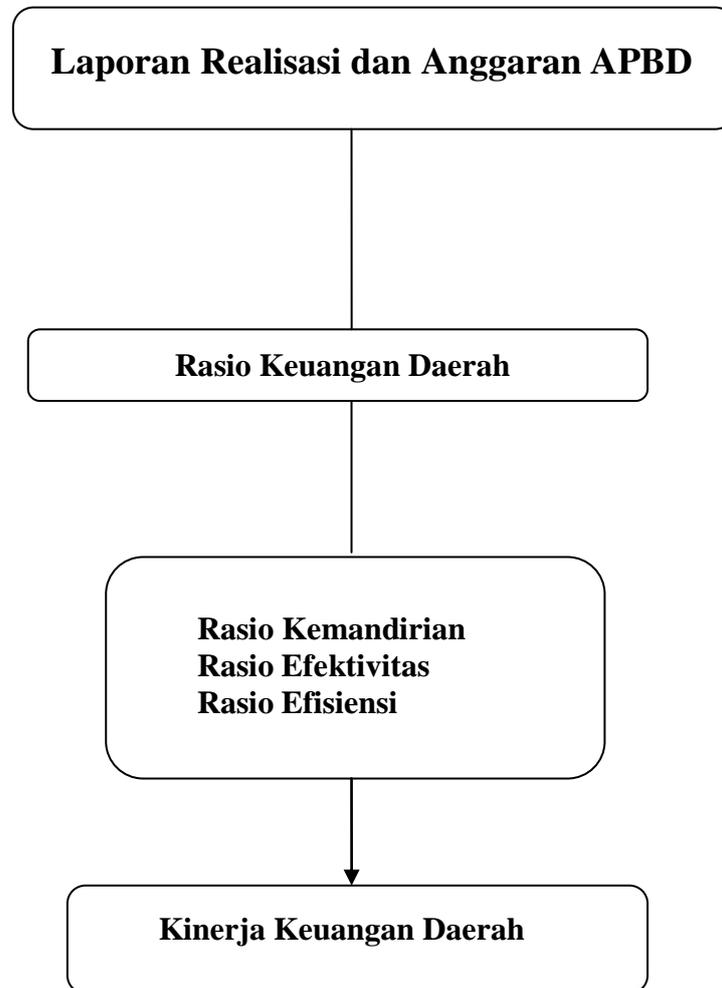
Menurut Halim (2008) menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Halim (2008 hal. 230) mengemukakan penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Kekeragaman, dan Rasio Pertumbuhan.

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Muhamad Rudiyanto (2015) dimana hasil penelitian dapat diketahui bahwa kinerja keuangan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong kurang baik, dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tergolong dalam kategori kurang, rasio efektivitas keuangan daerah termasuk kategori efektif, rasio aktivitas keuangan daerah termasuk kategori kurang baik, rasio pertumbuhan dikategorikan rendah.

Berdasarkan dari Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat disebutkan bahwa

untuk struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan . Hasil perhitungan rasio keuangan tersebut dapat menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai dalam pendapatan dan belanja daerah yang dapat dilihat dalam kerangka berpikir dibawah ini:



*Gambar 2.1 Kerangka Berpikir*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Binjai berupa data-data jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Binjai sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Menurut Moh. Nazir (2009 hal. 54), Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksiaan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah :

1. Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

2. Rasio keuangan daerah merupakan indikator dalam mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan, dimana rasio keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan :

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Yang dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

- b. Rasio Efektivitas merupakan rasio yang mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dan rasio ini dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

- c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) merupakan rasio yang mengukur tingkat pengefisienan atas belanja daerah, dengan menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Pemerintah Kota Binjai yang beralamat di jalan Jendral. Sudirman No. 6 Kota Binjai, Sumatera Utara

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2016 sampai dengan April 2017. Adapun rincian waktu dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	Nov				Des				Jan				Feb				Mar				Apr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pra Riset			■	■																				
2.	Pengajuan Judul				■	■	■	■																	
3.	Pengesahaan Judul							■																	
4.	Bimbingan Proposal								■	■	■	■	■												
5.	Penyelesaian Proposal									■	■	■	■												
6.	Seminar Proposal													■											
7.	Analisa Pengolahan Data															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8.	Bimbingan & Peny. Hasil Penelitian															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9.	Sidang Skripsi																								■

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka, yang diperoleh dari data anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan realisasi pendapatan dan belanja daerah. Dalam penelitian ini ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang

diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Binjai untuk tahun 2013 sampai tahun 2016.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumentasi, dimana dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota Binjai selama Tahun 2013 sampai tahun 2016 yang diperlukan oleh peneliti.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif yaitu untuk menghitung tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai yang berasal dari pendapatan dan belanja daerah kota Binjai berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Menghitung kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai dengan mengukur rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi keuangan daerah.
2. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai dengan indikator-indikator yang sesuai dengan teori.
3. Menarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Data**

Pemerintah Kota Binjai yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan juga dapat mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Pemerintah Kota Binjai maka diharapkan dari Pemerintah Kota Binjai untuk dapat mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Pemerintah Kota Binjai. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Pemerintah Kota Binjai, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Binjai yang berasal dari pajak dan retribusi daerah serta dana perimbangan yang diperoleh. Adapun retribusi daerahnya berasal dari retribusi tempat wisata, maupun retribusi tempat parkir, dan pajak daerahnya berasal dari pajak restoran, pajak reklame, pajak BPHTB. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

##### **2. Analisis Data**

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Binjai dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Kota Binjai dalam

bidang keuangan untuk kurun waktu 2013-2016. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Binjai pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Binjai. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Binjai. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

**a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{Rp.49.172.643.726}}{\text{Rp.711.568.038.362}} \times 100\%$$

$$= 6,9\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp.71.967.137.635}}{\text{Rp.804.091.375.966}} \times 100\%$$

$$= 9\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp.78.327.792.810}}{\text{Rp.843.711.784.005}} \times 100\%$$

$$= 9,3\%$$

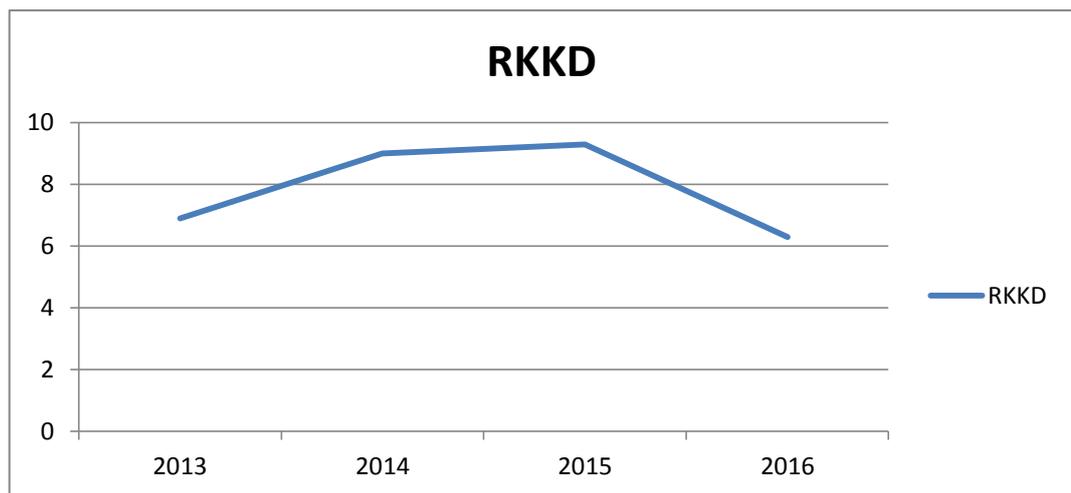
$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp.54.287.975.045}}{\text{Rp.867.041.924.063}} \times 100\%$$

$$= 6,3\%$$

**Tabel 4.1**  
**Rasio Kemandirian Pemerintah**  
**Kota Binjai**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	RKKD	Standar Rasio Kemandirian
2013	Rp. 49.172.643.726	Rp. 711.568.038.362	6,9%	75% - 100%
2014	Rp. 71.967.137.635	Rp. 804.091.375.966	9%	75% - 100%
2015	Rp. 78.327.792.810	Rp. 843.711.784.005	9,3%	75% - 100%
2016	Rp. 54.287.975.045	Rp. 867.041.924.063	6,3%	75% - 100%

*Sumber : Data diolah (2017)*



Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1. di atas kemampuan keuangan Pemerintah Kota Binjai mengalami peningkatan. Untuk tahun 2013 rasio kemandirian sebesar 6,9% yang termasuk dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0 sampai 25%. Untuk tahun 2014 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 9% tetapi masih termasuk dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0 sampai 25%.

Untuk tahun 2015 rasio kemandirian mengalami peningkatan 9,3% , tetapi juga masih termasuk dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0 sampai 25%. Untuk tahun 2016 rasio kemandirian mengalami

penurunan menjadi 6,3%, yang termasuk dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0 sampai 25%.

Walaupun rasio kemandirian mengalami peningkatan dan penurunan, tetapi masih tergolong rendah sekali, karena masih berada diantara 0 sampai 25%, selain itu rasio kemandirian pada Pemerintah Kota Binjai masih termasuk pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang kurang mampu melaksanakan otonomi daerah).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota Binjai untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, tetapi peningkatan yang terjadi masih dikategorikan rendah sekali, dimana Pemerintah Kota Binjai dianggap dalam mengelola pendapatan asli daerah kurang mampu berdiri sendiri dalam mengelola keuangan daerah, dan hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.

#### **b. Rasio Efektivitas**

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{Rp.711.568.038.362}}{\text{Rp.777.139.382.117}} \times 100\%$$

$$= 91,6\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp.804.091.375.966}}{\text{Rp.825.842.666.546}} \times 100\%$$

$$= 97,4\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp.843.711.784.005}}{\text{Rp.906.257.726.285}} \times 100\%$$

$$= 93,1\%$$

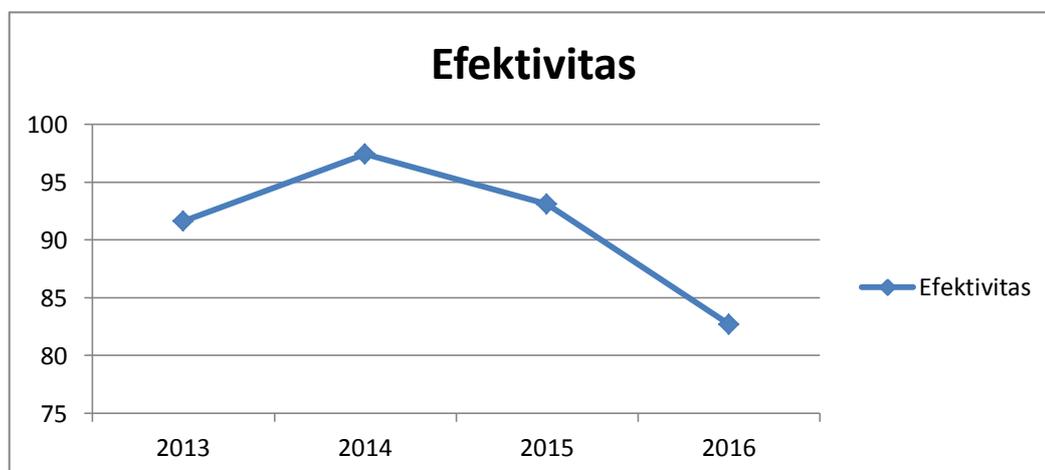
$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp.867.041.924.063}}{\text{Rp.1.048.464.949.879}} \times 100\%$$

$$= 82,7\%$$

**Tabel 4.2**  
**Rasio Efektivitas Pemerintah**  
**Kota Binjai**

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Efektivitas	Standar Rasio Efektivitas
2013	Rp. 711.568.038.362	Rp. 777.139.382.117	91,6%	(x > 100%)
2014	Rp. 804.091.375.966	Rp. 825.842.666.546	97,4%	(x > 100%)
2015	Rp. 843.711.784.005	Rp. 906.257.726.285	93,1%	(x > 100%)
2016	Rp. 867.041.924.063	Rp. 1.048.464.949.879	82,7%	(x > 100%)

*Sumber : Data diolah (2017)*



Dapat dilihat dari tabel 4.2 untuk target penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami fluktuatif, untuk tahun 2013 rasio efektivitas sebesar 91,6% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%, untuk tahun 2014 rasio efektivitas mengalami peningkatan menjadi 97,4% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%, sedangkan untuk tahun 2015 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 93,1% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%.

Dan untuk tahun 2016 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 82,7% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100% Untuk rasio efektivitas tahun 2013 sampai tahun 2016 masih termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah dari 100%.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pajak daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Pemerintah Kota Binjai untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah Kota Binjai dalam melakukan pengelolaan pendapatan daerah mengalami penurunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai.

### c. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{Rp.702.167.562.649}}{\text{Rp.711.568.038.362}} \times 100\%$$

$$= 98,7\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp.804.308.312.949}}{\text{Rp.804.091.375.966}} \times 100\%$$

$$= 100,02\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp.885.211.617.571}}{\text{Rp.843.711.784.005}} \times 100\%$$

$$= 105\%$$

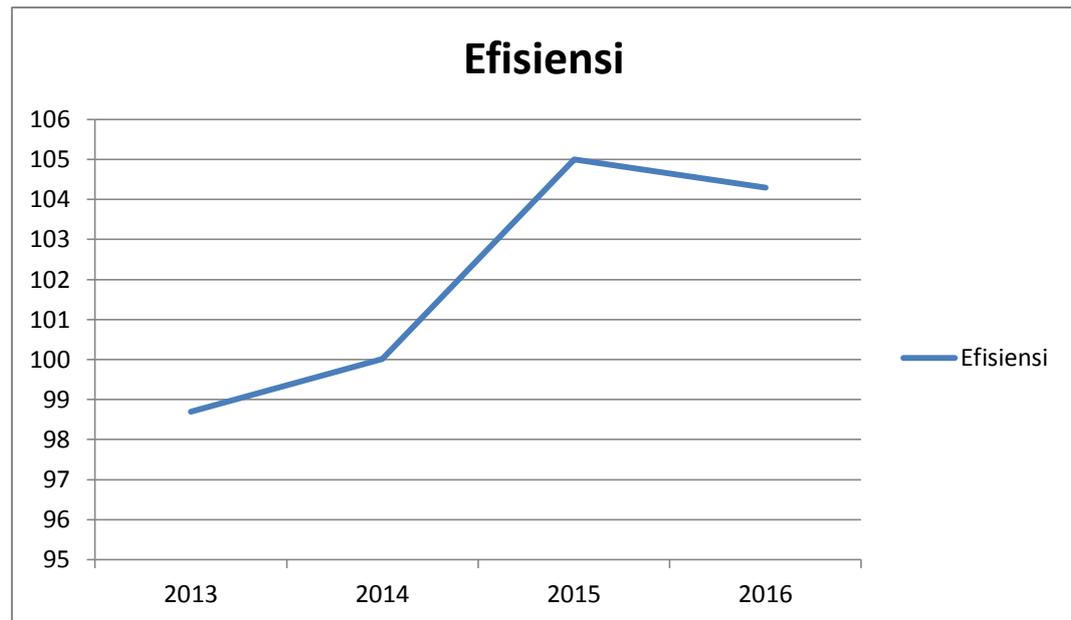
$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp.904.679.642.948}}{\text{Rp.867.041.924.063}} \times 100\%$$

$$= 104,3\%$$

**Tabel 4.3**  
**Rasio Efisien Pemerintah**  
**Kota Binjai**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Efisien	Standar Rasio Efisien
2013	Rp. 702.167.562.649	Rp. 711.568.038.362	98,7%	( x < 100%)
2014	Rp. 804.308.312.949	Rp. 804.091.375.966	100,02%	( x < 100%)
2015	Rp. 885.211.617.571	Rp. 843.711.784.005	105%	( x < 100%)
2016	Rp. 904.679.642.948	Rp. 867.041.924.063	104,3%	( x < 100%)

*Sumber : Data diolah (2017)*



Dapat dilihat dari tabel 4.3 untuk rasio efisiensi pada tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2013 rasio efisiensi sebesar 98,7% yang termasuk dalam kategori efisien karena berada dibawah 100%, sedangkan untuk tahun 2014 rasio efisiensi mengalami peningkatan menjadi 100,02% yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%, untuk tahun 2015 rasio efisiensi mengalami peningkatan menjadi 105% yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%. Dan untuk tahun 2016 rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 104,3% tetapi masih termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%.

Melalui analisis efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah Pemerintah Kota Binjai. Dengan perhitungan rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui

seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi Pemerintah Kota Binjai untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami penurunan. Untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2014 sampai tahun 2016 dalam kategori tidak efisien, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Daerah Kota Binjai. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah tidak mampu dalam meminimalkan belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Binjai.

## **B. Pembahasan**

Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik.

### **1. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Binjai bila diukur dengan rasio keuangan daerah.**

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Binjai yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini dapat dijelaskan dari rasio keuangan yaitu:

- a. Rasio kemandirian yang terjadi pada Pemerintah Kota Binjai bila dilihat dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami fluktuatif, Walaupun rasio kemandirian mengalami peningkatan, tetapi masih tergolong sangat rendah, karena masih berada diantara 0 sampai 25%, selain itu rasio

kemandirian pada Pemerintah Kota Binjai masih termasuk pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang kurang mampu melaksanakan otonomi daerah).

Menurut Halim (2008, hal 235) rasio kemandirian merupakan rasio kemandirian keuangan daerah yang menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer . Dimana bila rasio ini berada diantara 0% sampai dengan 25% masih dalam kategori rendah sekali, yang artinya kemampuan keuangan pemerintah atas pendapatan asli daerah kurang maksimal, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pendapatan transfer lebih besar.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk pengukuran rasio kemandirian pada Pemerintah Kota Binjai masih dikategorikan rendah, dimana Pemerintah Kota Binjai dianggap dalam mengelola pendapatan asli daerah kurang mampu berdiri sendiri dalam mengelola keuangan daerah, dan hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.

- b. Rasio Efektivitas yang terjadi pada Pemerintah Kota Binjai bila dilihat untuk tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Kota Binjai. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Binjai, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Binjai mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Binjai.

Dengan semakin tinggi rasio efektivitas retribusi daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif. (Mardiasmo, 2009 hal 136).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Pemerintah Kota Binjai untuk tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah Kota Binjai dalam melakukan pengelolaan pendapatan daerah mengalami penurunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai.

- c. Rasio Efisiensi yang terjadi pada Pemerintah Kota Binjai bila dilihat dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami fluktuatif, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Kota Binjai. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Binjai, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan karena besarnya belanja yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Binjai, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Binjai.

Menurut Mardiasmo (2009 hal 134) yang menyatakan bahwa dengan semakin rendahnya rasio efisiensi menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam kinerjanya semakin baik.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi Pemerintah Kota Binjai untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2014 sampai tahun 2016 dalam kategori tidak efisien, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Daerah Kota Binjai. Dengan meningkatnya rasio efisiensi

atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah tidak mampu dalam meminimalkan belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Binjai. Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Joko Pramono (2014) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian. Tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif, sedangkan untuk Pertumbuhan PAD cukup tinggi dan Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi.

**2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rasio keuangan daerah masih dibawah standar rasio daerah.**

Penyebabkan rasio keuangan daerah masih dibawah standar rasio daerah, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk tingkat kemandirian Pemerintah Kota Binjai untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, tetapi peningkatan yang terjadi masih dikategorikan rendah sekali, dimana Pemerintah Kota Binjai dianggap dalam mengelola pendapatan asli daerah kurang mampu berdiri sendiri dalam mengelola keuangan daerah, dan hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan besarnya jumlah dana sumbangan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dibandingkan dengan PAD yang diperoleh Pemerintah Kota Binjai.

Dimana penyebab menurunnya rasio kemandirian ini terjadi dikarenakan rendahnya jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Binjai, sehingga pemerintah daerah mesti banyak bergantung dengan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, guna untuk menjalankan kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

- b. Untuk tingkat efektivitas Pemerintah Kota Binjai untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami penurunan. Hal ini terbukti dengan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Binjai yang tidak mampu dalam mencapai target yang telah ditentukan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah Kota Binjai dalam melakukan pengelolaan pendapatan daerah mengalami penurunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai.

Penurunan yang terjadi untuk tingkat rasio efektivitas pemerintah daerah Kota Binjai, hal ini terjadi dikarenakan pendapatan yang diperoleh tidak mencapai anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Binjai dan meningkatnya anggaran atas pendapatan daerah, dimana menurunnya rasio efektivitas menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal dalam meningkatkan pendapatan daerahnya.

Untuk tingkat efisiensi Pemerintah Kota Binjai untuk tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami penurunan. Untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2014 sampai tahun 2016 dalam kategori tidak efisien, hal ini terbukti dengan besarnya jumlah biaya operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai

dibandingkan dengan Pendapatan yang diperoleh Kota Binjai. Peningkatan yang terjadi untuk rasio efisiensi terjadi dikarenakan besarnya jumlah belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai dibandingkan dengan pendapatan daerah. Hal ini tidak baik bagi Pemerintah.

Hal ini tidak baik bagi Pemerintah Daerah Kota Binjai. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atau pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah tidak mampu dalam meminimalkan belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Binjai.

Adapun penyebab penurunan yang terjadi pada kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kota Binjai terlihat dari masih rendahnya jumlah pendapatan daerah yang diperoleh Pemerintah Daerah Kota Binjai, serta besarnya jumlah belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahkan belanja yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kota Binjai berdasarkan penelitian yang di ukur melalui rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Binjai dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Binjai, dan meningkatnya belanja daerah Pemerintah Daerah Kota Binjai, selain itu juga pemerintah daerah Kota Binjai tidak mampu meningkatkan dan mengelola hasil pendapatan asli daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kota Binjai masih harus bergantung dengan dana pemerintah pusat .
2. Faktor yang menyebabkan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, jika ditinjau dari rasio kemandirian yang masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang mampunya pemerintah daerah Kota Binjai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah Kota Binjai bergantung dengan pemerintah pusat. Sedangkan untuk rasio efektivitas yang masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan pemerintah daerah Kota Binjai tidak mampu dalam mencapai target untuk pendapatan daerah tersebut. Dan untuk rasio efisiensi yang berada diatas standar keuangan daerah terjadi dikarenakan besarnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh

pemerintah daerah Kota Binjai, bahkan realisasi belanja daerah melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Binjai.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Binjai harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, seperti adanya penambahan atas pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak maupun retribusi daerahnya. Selain itu Pemerintah Kota Binjai selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Binjai dapat meningkatkan pembangunan pada sektor utama yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan fisik daerah, pembangunan jalan, irigasi, jaringan serta fasilitas umum masyarakat. Dan Pertumbuhan atas belanja rutin sebaiknya ditekan agar Pemerintah Kota Binjai dapat meminimalkan pengeluaran yang dilakukan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Agustina Oesi. A. (2013). *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang Tahun Anggaran 2007–2011*. Penelitian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jurnal Ilmiah vol 15. 2013
- Adhim Mohammad. (2008). *Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah dan Kaitannya dengan Perekonomian Daerah di Kabupaten Sarolangun*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jambi
- Dedi Nordiawan. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Joko Pramono. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*. Vol.7 No.13, Juli 2014
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi : Yogyakarta.
- Marizka. Addina. (2009). *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan*. FE USU: Medan.
- Mohamad Mahsun. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Moh. Nazir. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Moito. (2009). *Studi Pembangunan*. PT. Gramedia Buku Utama: Jakarta.
- Muhamad Rudiyanto. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Banten)*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
- Nirzawan. (2011). *Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah*. UPP YKPN: Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*: Jakarta
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*: Jakarta.

Widodo, Joko. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing : Malang.

Zulia Hanum. (2010). *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal Manajemen & Bisnis Vol 11 No. 01 April 2011.